

**REBRANDING SEBAGAI MANIFESTASI REFORMASI BIROKRASI  
ERA NEW NORMAL: PERSPEKTIF *DIGITAL ERA GOVERNANCE*  
(Studi Implementasi *Digital Weberian Bureaucracy (DWB)* Pada Badan  
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN))**

***REBRANDING AS MANIFESTATION OF THE NEW NORMAL ERA  
BUREAUCRATIVE REFORM: THE DIGITAL PERSPECTIVE OF THE  
ERA GOVERNANCE*  
(Study on Digital Implementation of *Weberian Bureaucracy (DWB)* at  
*National Population and Family Planning Board (BKKBN)*)**

**Yuliatris Mamuko<sup>1</sup>, dan Ricardi S. Adnan<sup>2</sup>**  
**Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Indonesia Depok Jawa Barat 16424**  
**email: <sup>1</sup>yuliatris.mamuko@ui.ac.id, <sup>2</sup>ricardi.adnan@gmail.com**

**Abstrak**

*Artikel ini bertujuan untuk menerangkan bagaimana BKKBN sebagai Lembaga pemerintah melakukan reformasi birokrasi di era digital governance yang dikaji menggunakan konsep Digital Weberianism Bureaucracy (DWB), secara spesifik yang berlangsung selama pandemi covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yang didukung oleh wawancara sebagai sumber informasi untuk mengungkap aktor-aktor yang berperan dalam program rebranding BKKBN. Dengan Pendekatan mix method diharapkan dapat menghasilkan rumusan strategi optimalisasi rebranding BKKBN. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis interaktif Miles and Huberman (1994) dan pemetaan aktor dikaji menggunakan pendekatan Social Network Analysis (SNA) dengan bantuan software Gephi. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi bagi para pembuat kebijakan di era digital governance serta untuk memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terkait konsep DWB di era digital. Hasil penelitian menunjukkan rebranding yang telah dilakukan oleh BKKBN merupakan metamorfosa bentuk kerja birokrasi dari konvensional menjadi digital. terlebih pada masa pandemic covid-19 ini hampir seluruh kerja BKKBN dilakukan dengan pemanfaatan internet dalam skala masif.*

**Kata kunci:** *Digital Weberianism Bureaucracy, Digital Governance, Reformasi Birokrasi*

**Abstract**

*This article aims to explain how the BKKBN as a government agency carried out bureaucratic reform in the era of digital governance which was studied using the concept of Digital Weberianism Bureaucracy (DWB), specifically that took place during the Covid-19 pandemic. This research was conducted using social media supported by interviews as a source of information to reveal the actors who played a role in the BKKBN rebranding program. With the mix method approach, it is expected to produce a strategy for optimizing the BKKBN rebranding strategy. The data obtained were analyzed using interactive analysis by Miles and Huberman (1994) and the mapping of actors was analyzed using the Social Network Analysis (SNA) approach with the help of Gephi software. This research was conducted to contribute to policy makers in the era of digital governance and to make theoretical and practical contributions related to the DWB concept in the digital era. The result of this research show that the rebranding that has been carried out by BKKBN is a metamorphosis of the form of bureaucratic work from conventional to digital, especially during this Covid-19 pandemic, almost all of the work of the BKKBN is carried out using the internet on a massive scale. .*

**Keywords:** *Digital Weberianism Bureaucracy, Digital Governance, Bureaucratic Reform.*

## PENDAHULUAN

Birokrasi telah banyak dikritik di banyak teori organisasi dan literatur manajemen, yang dianggap tidak efisien dan tidak mampu menanggapi perubahan eksternal (Styhre, 2007). Namun, Birokrasi dalam era digital dipaksa bergerak cepat mengikuti perkembangan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis yang menuntut birokrasi pemerintahan untuk dapat menyesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

BKKBN sebagai organisasi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 juga ikut melakukan reformasi birokrasi menuju SPBE. Pandemi *Covid-19* yang terjadi di awal bulan Maret Tahun 2020 turut mempercepat penetrasi digital yang dialami BKKBN. Dinamika kerja di BKKBN saat ini tidak lepas dari berbagai bentuk pemanfaatan *digital platform* diantaranya *big data* dan *internet of things* (IoT). Rapat-rapat menggunakan *platform virtual meeting* (VM), presensi berbasis visual *real time* dan *share location*, perizinan berbasis aplikasi, pengadaan berbasis elektronik, dan berbagai bentuk terobosan/aplikasi baru yang berbasis digital.

BKKBN menyadari betul, bahwa saat ini penduduk Indonesia lebih dari 35% adalah *millennials*, oleh karena diperlukan cara-cara baru didalam mengkampanyekan program-program kerja BKKBN. Pemanfaatan berbagai bentuk *digital platform* adadalah sebuah keniscayaan, media-media *mainstream* di era 70-80an yang digunakan BKKBN untuk kampanye program kerja seperti seni pertunjukan ketoprak, sandiwara radio, sinetron tampak sudah usang dan ditinggalkan oleh *audience*. Saat ini sasaran BKKBN adalah para remaja usia produktif, peran remaja sangat strategis untuk masa depan negara dan keberlangsungan pembangunan bangsa oleh karenanya seluruh program-program kerja BKKBN sudah selayaknya berbasis digital, agar mudah dalam implementasi dan tepat sasaran, karena *millennials* adalah generasi yang seluruh dinamika dan aspek kehidupannya berada dalam ekosistem digital.

Dalam era digital seperti sekarang, dimana khalayak sasaran organisasi sudah berubah, BKKBN merasa perlu membangun posisi baru (*repositioning*), sehingga menjadikan BKKBN tetap relevan dan terpercaya dalam informasi Pembangunan Keluarga berkualitas serta merefleksikan revolusi mental dalam membangun hubungan antara program pemerintah dan masyarakatnya. *Rebranding* dianggap sebagai cara tepat untuk memposisikan ulang BKKBN agar profil dan peran BKKBN menjadi lebih akurat dan relevan dengan tuntutan di era digital.

*Rebranding* BKKBN berupaya untuk dapat terlibat seluas mungkin bersama masyarakat agar BKKBN dapat lebih dekat dan relevan dengan alam pikiran serta karakter masyarakat saat ini. Para remaja usia produktif adalah ujung tombak program kerja BKKBN, diharapkan jadi motivator program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). BKKBN memiliki program kerja unggulan yaitu menjamin bahwa remaja yang luar biasa harus tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan siap untuk bisa menjadi subjek pembangunan menuju Indonesia yang maju dan berkualitas

dan remaja calon pasangan usia subur yang akan membentuk keluarga dan calon orangtua bagi anak-anaknya, harus memiliki perencanaan dan kesiapan berkeluarga. Oleh karenanya, karena segmentasi utama atau sasaran utamanya adalah generasi muda yang secara relatif mereka melek teknologi, maka seluruh program-program kerja di BKKBN hendaknya memanfaatkan berbagai *platform digital* dan secara simultan menciptakan iklim *digital government*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus kajian pada artikel ini adalah: *Pertama*, dalam rangka peningkatan layanan menuju SPBE serta adanya Pandemi Covid-19, birokrasi pemerintahan dipaksa untuk dapat bertransformasi dari birokrasi yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi birokrasi digital yang memanfaatkan perkembangan TIK. *Rebranding* yang dilakukan BKKBN merupakan salah satu bagian dari upaya BKKBN untuk dapat bertransformasi secara evolusioner.

*Rebranding*, dalam hal ini tidak terbatas pada perubahan logo, *tagline* maupun *jingle* tetapi lebih luas dari itu dapat diartikan sebagai perubahan cara kerja dan pola pikir para pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Penguasaan TIK bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di BKKBN menjadi penting agar dapat mengembangkan dirinya sehingga mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

*Kedua*, *Rebranding* yang dilakukan BKKBN bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi merupakan bagian yang sangat penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. *Rebranding* yang dilakukan BKKBN seyogyanya dipahami dan dimengerti oleh seluruh ASN di BKKBN. Berdasarkan studi awal dari peneliti, maka didapatkan data;

Tabel 1. Persepsi ASN terhadap *rebranding* di BKKBN

| <b>Tujuan <i>rebranding</i></b>  | <b>Presentase</b> |
|--|-------------------|
| <b>Yang diketahui responden</b>  |                   |
| Tingkat kemanfaatan <i>rebranding</i>                                    | 70%               |
| Tingkat kesesuaian strategi <i>rebranding</i> dengan hasil yg diharapkan | 50%               |
| Keterlibatan dalam mensukseskan <i>rebranding</i>                        | 40%               |

Sumber: Data pra-riset diolah peneliti, Desember 2020.

Survei awal ini dilakukan terhadap 80 ASN yang dengan komposisi responden 40 orang ASN fungsional umum, dan 40 orang ASN fungsional tertentu. Penulis mengambil responden secara random untuk mengisi kuesioner pada setiap unit kerja eselon II (direktorat/Biro/Inspektorat/Puslitbang). Hasil survei menunjukkan 70% ASN menganggap *rebranding* yang dilakukan BKKBN membawa manfaat bagi program-program BKKBN. Namun, keterlibatan ASN dalam mensukseskan *rebranding* masih rendah yakni 40%.

*Ketiga*, *rebranding* dalam perjalanannya membuat BKKBN melibatkan ber-

bagai mitra mulai dari artis/*public figure*, perguruan tinggi, toko masyarakat, toko agama dan bahkan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan misi BKKBN yang keempat yaitu “Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga”. Kemitraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kerjasama dengan sahabat, teman maupun kawan kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Soekidjo Notoatmojo (2003) kemitraan adalah kerjasama dalam bentuk formal yang terikat kontrak kerja berlandaskan hukum yang dijalankan bersama oleh perorangan,

komunitas atau sebuah institusi untuk mencapai tujuan tertentu. *Rebranding* dapat berjalan dengan efektif apabila kita mampu mengidentifikasi aktor mana yang paling dominan dalam keberhasilan program tersebut.

Secara teoritis penelitian ini signifikan untuk dilakukan karena menawarkan pendekatan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya tidak meneliti birokrasi dengan kacamata DWB, tetapi hanya meneliti konektivitas antar birokrasi dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sementara penelitian ini bertujuan untuk meneliti Reformasi Birokrasi BKKBN Dalam Era New Normal dengan menggunakan Perspektif Digital Weberianism Bureaucracy dan Digital Era Governance dengan menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA) dengan bantuan software Gephi.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi formulasi dan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan di BKKBN mengenai organisasi yang dipimpinnya sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan sebagai upaya mereformasi birokrasi dengan menggunakan Perspektif *Digital Weberianism Bureaucracy* dan *Digital Era Governance*.

## PEMBAHASAN

### Tinjauan Pustaka

Saat dimana trend dunia terus berputar cepat, mungkin sulit untuk mempertahankan citra modern bagi sebuah *brand*. *Rebranding* merupakan opsi yang terkadang dilupakan oleh para pemilik bisnis atau organisasi, oleh karenanya tidak heran jika tiba-tiba mendengar sebuah *brand* besar/terkenal tiba-tiba gulung tikar atau *kolaps*. *Rebranding* adalah proses mengubah citra perusahaan dari suatu organisasi. Ini adalah strategi pasar memberikan nama baru, simbol, atau perubahan desain untuk merek yang sudah mapan. Ide di balik *rebranding* adalah

untuk menciptakan identitas yang berbeda untuk sebuah merek, dari pesaingnya, di pasar. Konsep *rebranding* sendiri menurut Muzellec & Lambkin (2006) menyatakan bahwa proses *rebranding* adalah suatu proses menciptakan gambaran baru dan posisi baru di pikiran konsumen dari suatu brand yang sudah ada, untuk membangun positioning yang berbeda di mata konsumen dan pesaing.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji bagaimana organisasi pemerintahan melakukan reformasi birokrasi yang menekankan pada adopsi teknologi dengan menggunakan teori birokrasi weberian. Birokrasi merupakan sarana yang paling rasional untuk pelaksanaan organisasi yang efisien. Ciri utama birokrasi Weberian klasik yang menekankan pada efisiensi, objektivitas, dan rasionalitas. Seiring perjalanan waktu, ternyata birokrasi pun perlu mengalami metamorfosa. Pada titik tertentu, birokrasi pada akhirnya masuk dalam iklim reformasi. Reformasi birokrasi menjadi isu penting awal dekade 90-an.

Komitmen Pemerintah Indonesia tentang SPBE tertuang dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan tersebut dapat dimaknai sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi menuju *Digital Era Government (DEG)*. *Digital Era Government (DEG)* yang berbasis teknologi informasi telah muncul sebagai aliran baru dalam organisasi di *public sector*, yang telah menggeser dan mendominasi beberapa paradigma sebelumnya, termasuk *New Public Manajemen* (Dunleavy et al., 2006). Meningkatnya penerimaan gagasan bahwa dunia masa depan akan semakin banyak berhubungan dengan teknologi dan inovasi, akan tepat untuk mempromosikan prosedur digitalisasi dan layanan pemerintah yang seharusnya memberikan pengurangan yang signifikan dalam biaya operasi karena manajemen yang otomatis di mana aliran informasi yang terus menerus dan konstan antara manajemen dan populasi, menghasilkan transparansi yang lebih besar (Llc et al., 2020). Konsepsi SPBE ini pada gilirannya adalah sebuah momentum yang

dapat menjadikan *rebranding* berjalan lebih efektif. Regulasi legal formal dalam SPBE dapat menjadi landasan sekaligus payung hukum implementasi *rebranding* BKKBN, yang kesemua programnya tidak lepas dari aspek digital dan berbasis elektronik.

Reformasi menurut KBBI adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Sedangkan, menurut Sedarmayanti (Sedarmayanti, 2009) reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi rasional dengan berbagai pengaturan serta otoritas yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini kemudian sejalan dengan pengertian Reformasi birokrasi menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yakni, merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. ([www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id), diakses 19 Februari 2021).

Sejatinya reformasi birokrasi adalah upaya perbaikan yang dilaukukan untuk mencapai tujuan organisasi, mencapai konsep ideal birokrasi. BKKBN memandang reformasi birokrasi dapat dilaksanakan dengan *rebranding*, karena BKKBN menyadari betul bahwa *brand* lama telah usang, dan apabila terus dipertahankan maka BKKBN akan menjadi sebuah organisasi birokrasi yang ketinggalan zaman yang hanya meng-agungkan kejayaan masa lalu tanpa memandang masa depan. BKKBN adalah organisasi birokrasi yang bertanggungjawab atas kesiapan generasi muda yang handal dan berkualitas, oleh karenanya reformasi birokrasi di BKKBN melalui *rebranding* adalah sebuah upaya yang selaras dengan cita-cita besar penciptaan birokrasi yang adaptif dan profesional.

Beberapa peneliti mencoba mengambil point utama reformasi birokrasi sebagai tema riset, antara lain; Beckert (2010), Yang, L and Zhang (2017), Osborne (2010), Kolleck, N., Jörgens, H., & Well, (2017), Zhang (2020). Berdasarkan tipologi yang dikemukakan oleh DiMaggio dan Powell, Bekert (2010) menunjukkan bahwa mengidentifikasi perubahan organisasi sebagai sumber perubahan isomorfik. Kondisi yang mendorong perubahan kelembagaan ke arah homogenisasi atau divergensi. Sementara menurut Zhang (2020) hasil inovasi yang berbeda merupakan hal penting dari strategi negara untuk mengelola tantangan perkembangan teknologi dan institusi sosial-politik yang mendasarinya. Osborne (2010) mengungkapkan bagaimana sektor publik mengadopsi peran organisasi swasta, yang menunjukkan serangkaian peningkatan inisiatif melalui identifikasi perilaku.

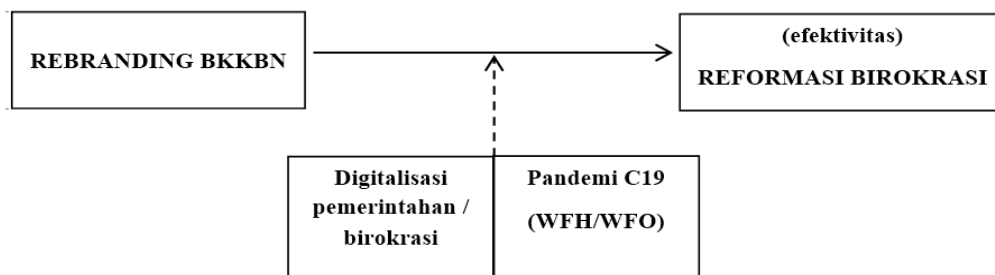
Digital Weberianism Bureaucracy (DWB) secara spesifik pernah dibahas antara lain oleh Muellerleile & Robertson (2018), Meilani & Hardjosoekarto (2020), Schroeder (2015), Ray, L., Reed, M., Ray, L., & Reed, (1994), Dash, S. S., & Padhi (2020). Muellerleile & Robertson (2018) berpendapat bahwa ciri-ciri utama birokrasi politik Weber efisiensi, objektivitas, dan rasionalitas telah berubah dan memberikan bentuk baru kurang terlihat, tetapi birokrasi digital tidak kalah kuat. Digitalisasi dalam dunia birokrasi dapat memberikan kebebasan baru dalam pelaksanaan pekerjaan, struktur baru birokrasi yang mengacu pada relasi baru dan capaian kinerja yang baru. Sementara Meilani & Hardjosoekarto (2020) menggunakan konsep DWB untuk meneliti kewaspadaan dan pengurangan resiko bencana di Selat Sunda Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan perlunya pengaturan kelembagaan di tingkat makro yang didukung dengan Peraturan Pemerintah, data bencana serta manajemen informasi yang terintegrasi.

Beberapa kajian yang berkaitan dengan *Digital Era Governance* (DEG) pernah dikaji oleh Dunleavy et al., (2006), Kolleck, N., Jörgens, H., & Well (2017), Tassabehji

et al., (2016) dan Gao & Tan (2020). Digital Era Government (DEG) yang berbasis teknologi informasi telah muncul sebagai aliran baru dalam organisasi di sector public, yang telah menggeser dan mendominasi beberapa paradigma sebelumnya, termasuk New Public Manajemen (NPM) (Dunleavy et al., 2006). Pendekatan Weberian dapat mengetahui tentang peran teknologi dalam masyarakat dari perspektif perbandingan-historis dan tidak hanya fokus pada sarana dan kemampuan untuk menggunakan Internet tetapi jangkauannya dan siapa yang

mendominasi kontennya (Schroeder, 2015). Sementara Gao & Tan (2020) yang mengkaji hubungan negara dan masyarakat di era digital China serta gambaran hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi yang dibangun dengan sistem administrasi gaya Weberian yang didukung dengan teknologi digital menemukan bahwa partisipasi warga secara online berfungsi sebagai alat informasi bagi otoritas tingkat yang lebih tinggi untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dari atas ke bawah.

Gambar 1. Konstelasi Hubungan Antar Variabel



### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *mix method*. Peneliti melaksanakan tahap *pra-research* untuk mendapatkan data kualitatif sebagai data pembuka wawasan, lalu peneliti menggali data kuantitatif untuk dapat menghasilkan rumusan strategi optimalisasi rebranding BKKBN Pusat dengan menganalisis jejaring sosial dalam *rebranding* BKKBN dengan menggunakan SNA dengan *software* Gephi. Metode penelitian ini digunakan karena merupakan teknik baru dalam menganalisis jaringan yang paling sesuai untuk kumpulan data berskala besar dari jenis yang umumnya tidak dapat diselidiki menggunakan teknik analisis jaringan sosial konvensional (Scott, 2011)

Social Network Analisis (SNA) adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjelaskan sejauh mana aktor jaringan terhubung satu sama lain dan struktur hubungan yang terjalin (Scott, 2011). Sedangkan Gephi adalah *software* visualisasi jaringan yang

digunakan dalam berbagai disiplin ilmu yang memiliki kemampuan untuk menampilkan proses spasialisasi, yang bertujuan untuk mengubah jaringan menjadi peta. (Jacomy et al., 2014).

Analisis jaringan dapat meliputi 3 level analisis yakni individu, *klik* dan sistem. Hal ini menegaskan bahwa penelitian jaringan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dalam menggambarkan fenomena struktur komunikasi dari aras sederhana hingga aras yang kompleks.

Dalam rangka mencapai hasil yang komprehensif dalam penelitian ini, maka penulis melakukan berbagai macam cara. Pertama, peneliti akan melibatkan diri dalam berbagai diskusi yang ada di internal karyawan BKKBN Pusat, baik dalam forum diskusi resmi ataupun diskusi informal. Yang kedua penulis mencoba menggali praktek digitalisasi di BKKBN, hal ini dilakukan penulis untuk mendapat berbagai temuan yang mendukung tujuan penelitian. Dan yang terakhir peneliti akan mencoba menambahkan temuan-temuan yang ada

dilapangan untuk memperkaya teori yang sudah ada.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak-pihak yang terkait dalam proses *rebranding* BKKBN baik secara langsung maupun tidak langsung. Sampelnya adalah pihak-pihak yang secara aktif terlibat dalam proses *rebranding* BKKBN. Untuk mengelaborasi dan mengeksplorasi peran aktor yang telah dikonfirmasi, maka dilakukan wawancara jarak jauh untuk mengetahui sejauh mana perannya. Responden dipilih berdasarkan purposive sampling dengan mengacu pada tujuan penelitian.

Untuk menjawab tujuan riset maka dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, studi literatur (dari laporan, arsip, jurnal, dan sebagainya), serta observasi partisipan, karena peneliti terlibat langsung dalam fokus penelitian yang dimaksud. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *social network analysis* untuk menjawab peran serta/keterlibatan aktor dalam kegiatan *rebranding*, dimana visualisasi jaringan dimodelkan dengan menggunakan software Gephi untuk mengidentifikasi aktor yang berpengaruh atau memiliki nilai interaksi yang tinggi di dalam jaringan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan *rebranding*. Pengumpulan dokumen terkait penelitian ini juga akan dilakukan untuk dianalisis dan dielaborasi dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

### **Hasil Analisis Dan Pembahasan**

Fenomema digitalisasi dalam dunia birokrasi tentu sangat menarik jika kita analisis menggunakan perspektif Digital Weberianism Bureaucracy (DWB) yang diperkenalkan oleh Muellerleile & Robertson (2018). Konsep DWB, merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori klasik birokrasi Weberian. DWB memiliki penekanan pada digitalisasi dalam segala aspek pelaksanaan roda

birokrasi. DWB dalam hal ini berprinsip pada pengoptimalisasian aspek efisiensi, objektivitas, dan rasionalitas.

Menurut Muellerleile & Robertson (2018) Era digital ditandai dengan beberapa perubahan dari modern birokrasi menjadi digital birokrasi diantaranya “pergerakan kertas” berubah menjadi “pergerakan data”; bentuk baru infrastruktur digital codes, algorithms, platforms; dan adanya jejak digital yang menggantikan arsip, serta para pakar yang digantikan dengan data scientists.

Melalui siaran pers nya No. RILIS/155/B4/BKKBN/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 BKKBN menyadari betul arti dan peran generasi muda/milenial didalam menunjang seluruh agenda besar reformasi birokrasi. Milenial dipersepsikan sebagai generasi yang akrab dan banyak mendapat pengaruh dari penggunaan *gadget* dan internet, tanpa mengacu secara spesifik pada kelompok umur tertentu. “anak jaman now” atau “yang kekinian” menjadi julukan yang cukup umum melekat padanya. Dari segi usia, lebih banyak menganggap kelompok milenial sebagai generasi muda yang berusia sekolah hingga berumur 25 tahun. Namun pada kelompok umur remaja sampai umur 40 tahunan, selama masih terhubung dengan gadget & teknologi informasi, masih dianggap sebagai bagian dari milenial. Pola komunikasi milenial sangat tergantung dengan penggunaan internet dan *smartphone* yang sangat kuat dan mengandalkan informasi dan interaksinya lewat media tersebut, hal ini tentu sejalan dengan gagasan Muellerleile & Robertson (2018).

Saat ini BKKBN berusaha untuk melakukan berbagai terobosan guna “kembali” memperkenalkan eksistensi BKKBN. Sedikit generasi muda yang mengenal BKKBN, tidak merasakan BKKBN itu sesuatu yang “terhubung” dengan mereka. Sedikit yang tahu BKKBN dan *awareness* hanya sebatas pada soal KB atau pernah mendengar tentang “2 anak cukup”. *Rebranding* pada gilirannya dipandang sebagai sebuah cara ampuh untuk membangkitkan kejayaan BKKBN.

(Statement Deputi ADPIN BKKBN, disampaikan dalam seminar “Re-Branding & Budaya Kerja Baru BKKBN, Jakarta 04 November 2020)

*Rebranding* yang sangat kentara salah satunya adalah perubahan logo BKKBN. Persepsi terhadap Logo BKKBN selama ini tidak terlalu dianggap penting dan terkait dengan generasi muda. Diantara logo yang ada, sebagian lebih menyukai gagasan logo lama (1970-an) karena visualisasi yang menggambarkan profil keluarga yang harmonis dan mengayomi (*nurturing family*) dengan tulisan keluarga berencana. Visualisasi logo sekarang dinilai lebih modern, cukup menarik namun visualisasinya kurang memberikan makna yang mendalam (Gambar anak diluar posisi orang tua, kesannya seperti tarik-tarikan).

Terkait slogan BBBKN, Slogan “2 anak cukup” mudah dipahami dan selama ini cukup dikenal orang. Bagi sebagian kalangan BKKBN, dianggap memberikan output yang jelas untuk pencapaian program KB. Namun sebagian milenial menganggap slogan ini instruksional, memaksa untuk membatasi jumlah anak dan di Maluku slogan ini tidak didukung pemerintah provinsi karena dianggap membatasi pertumbuhan penduduk. Slogan “Kalau terencana, semua lebih mudah” dianggap lebih relevan untuk milenial, mencakup fase-fase kehidupan mereka, tidak bersifat instruksional dan mendorong milenial untuk berfikir. (Anugrahadi Saiful, 2020)

Pemanfaatan teknologi digital didominasi pada pemanfaatan media sosial. Media sosial digunakan untuk aktivitas berupa *consuming* dan *connecting*. Sedikit yang menggunakan untuk kepentingan bisnis. *Consuming* mengacu pada memanfaatkan isi media untuk menambah pengetahuan (membaca berita, mengikuti perkembangan/situasi sosial saat ini, memperbarui informasi (update status, memasang informasi tentang hal baru (tempat aktivitas (tempat makan atau tempat berkumpul), peristiwa, objek (makanan), dll), bermain game, bertransaksi secara online, dan lainnya. *Connecting* untuk mempertemukan individu dengan individu lainnya dalam konteks yang personal atau membangun hubungan personal. (Karman, 2013)

Di dalam penelitian ini Muellerleile & Robertson (2018) berpendapat bahwa ciri-ciri utama birokrasi politik Weber efisiensi, objektivitas, dan rasionalitas telah berubah dan memberikan bentuk baru yang kurang terlihat, tetapi birokrasi digital tidak kalah kuat. Digitalisasi dalam dunia birokrasi dapat memberikan kebebasan baru dalam pelaksanaan pekerjaan, struktur baru birokrasi yang mengacu pada relasi baru dan capaian kinerja yang baru. Lebih lanjut, Muellerleile & Robertson (2018) menekankan pada adopsi teknologi dan digitalisasi sebagai dampak perubahan yang tak terhindarkan dari perkembangan zaman yang merupakan pengembangan teori klasik birokrasi yang digagas Weber menjadi Weberianism digital.

**Tabel 2. Perbandingan Konsep Birokrasi Weberian dan Birokrasi Digital**

| <b>Birokrasi Weberian</b> | <b>Birokrasi Digital</b>       |
|---------------------------|--------------------------------|
| Knowledge                 | Data                           |
| The public                | Big data                       |
| Bureau/office             | Platform                       |
| Professional/expert       | Data scientist                 |
| Charismatic leader        | “Talented” innovator/disruptor |
| Rule                      | Code                           |
| Procedure                 | Algorithm                      |
| Files & archive           | Digital footprint              |
| Iron cage                 | Silicon web                    |

Sumber: Muellerleile & Robertson (2018)



**Tabel 3. Prinsip Birokrasi dan Transformasi Digital**

| <b>Bureaucratic Principle</b>   | <b>Political Economic Discourse</b>                                      | <b>Means of Digital Manifestation/Transformation</b>               |
|---|--|--|
| <b>Efficiency</b><br>(of means to ends)                                       | Austerity,<br>Sustainability,<br>Logistics,<br>Competition               | Routinization,<br>Financialization, Accountability,<br>Smart City  |
| <b>Objectivity</b><br>(procedural neutrality,<br>autonomy from<br>“politics”) | Big Data,<br>Transparency,<br>Accountability,<br>Evidencebased<br>Policy | Big Data, Openness,<br>Crowdsourcing, Algorithm,<br>Quantification |

Sumber: Muellerleile & Robertson (2018)

Muellerleile & Robertson (2018) berpendapat bahwa neoliberal capitalisme telah meluas menjadi versi digital, sehingga membuat tujuan sosial menjadi sarana teknis. Dimulai dengan penjelasan tentang gagasan Weber tentang birokrasi, yang berfokus pada prinsip efisiensi, objektivitas, dan rasionalitas yang kemudian diikuti oleh kemunculan teknologi digital yang kemudian mengubah tatanan birokrasi sebagai “kapitalisme” menjadi lebih bergantung pada informasi dan pasar neoliberal. Muellerleile & Robertson (2018) juga berpendapat bahwa legitimasi tata kelola digital telah menunjukkan betapa tekno-ilmiahnya rasionalitas yang dikombinasikan dengan ideologi neoliberal yang merubah subordinat tujuan sosial menjadi sarana ekonomi.

Penelitian ini menjelaskan mengenai “New publik Manajemen” (NPM) dalam yang mengalami perubahan organisasi karena disgregasi, persaingan, dan insentif. Meskipun efeknya masih terjadi di negara-negara yang baru mengenal NPM, perubahan ini telah terhenti atau terbalik di beberapa negara maju. Hal ini mencerminkan akumulasi efek tidak langsung yang merugikan kapasitas warga negara untuk memecahkan masalah sosial. karena NPM telah secara radikal meningkatkan kompleksitas kelembagaan dan kebijakan.

Penelitian ini juga mengemukakan berbagai perubahan yang terkait dan berpusat pada teknologi informasi akan menjadi penting untuk dalam perubahan saat ini dan yang akan datang, dan semakin fokus pada tema reintegrasi, holisme berbasis kebutuhan, dan perubahan digitalisasi. Keseluruhan perubahan baru tersebut akan menuju kepada “pemerintahan era digital” (DEG), yang melibatkan reintegrasi fungsi ke dalam lingkup pemerintahan, adopsi holistik dan terstruktur berorientasi kebutuhan dan kemajuan digitalisasi dalam proses administrasinya. DEG juga membuka menciptakan berbagai perubahan pada budaya organisasi, dan sosial sebagai efek dari teknologi. Secara umum temuan dalam penelitian ini adalah *Digital era Government* (DEG) yang berbasis teknologi informasi telah muncul sebagai aliran baru dalam organisasi di sector public, yang telah menggeser dan mendominasi beberapa paradigma sebelumnya, termasuk *New Public Management* (NPM).

**Tabel 4. Komponen Kunci Digital Era Governance**

| <i>Theme</i>                  | <i>Component</i>   |
|-------------------------------|--|
| <i>Reintegration</i>          | <i>Rollback of agencification<br/>Joined-up governance (JUG)<br/>Re-governmentalization<br/>Reinstating central processes<br/>Radically squeezing production costs<br/>Reengineering back-office functions<br/>Procurement concentration and specialization<br/>Network simplification</i> |
| <i>Needs-Based Holism</i>     | <i>Client-based or needs-based reorganization.<br/>One-stop provision Interactive and “ask once” information-seeking.<br/>Data warehousing<br/>End-to-end service reengineering<br/>Agile government processes</i>   |
| <i>Digitization Processes</i> | <i>Electronic service delivery<br/>New forms of automated processes-zero touch technologies (ZTT)<br/>Radical disintermediation<br/>Active channel streaming<br/>Facilitating isocratic administration and co-production Moving toward open-book government</i>                            |

Sumber: Dunleavy et al., (2006)

## PENUTUP

### Simpulan

Saat ini masalah Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) mendapatkan tantangan karena era yang telah berubah. Pada hakekatnya, pembangunan manusia Indonesia yang sukses mensyaratkan kondisi di mana Keluarga mampu menjalankan kehidupan berkualitas dengan perencanaan yang baik untuk seluruh anggota keluarga dalam setiap tahap kehidupan. Pembangunan Manusia Indonesia mesti didasarkan pada aspek manusianya atau khalayak pembangunan, dimana khalayak utama program BKKBN saat ini adalah Generasi X dan Millenials. Jika dilihat struktur umur khalayak, maka yang menjadi konstituen utama BKKBN saat ini adalah para millennials yaitu generasi yang lahir pada kisaran tahun 1980- 2000-an. Millennials dianggap istimewa karena generasi ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, apalagi dalam hal yang berkaitan dengan konsep diri, konsep hidup, dan penggunaan teknologi. Di Indonesia sendiri dari jumlah 255 juta penduduk yang telah tercatat, terdapat 81 juta merupakan generasi millenials atau berusia 19-39 tahun.

Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang berbeda dalam memberikan pemahaman program Bangga Kencana karena Pendekatan untuk era *Baby Boomer* (lahir di era 1946-1955) sudah tidak relevan.

Di era ini, muncul kebutuhan untuk melakukan *rebranding*. Brand sendiri merupakan nama, istilah, desain, symbol atau karakteristik lain yang memberikan identitas spesifik dan unik atas produk (baik barang maupun jasa) yang sesuai dengan kebutuhan khalayak sasarannya atau membedakannya dengan kompetitor. Pendekatan pemosisian BKKBN selama ini, yang misalnya tercermin dalam tagline “Dua anak cukup” mereduksi BKKBN ke dalam ranah yang sempit yakni semata isu fertilitas, padahal BKKBN dirancang untuk berkontribusi lebih luas dari hal itu. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memposisikan ulang BKKBN agar profil dan peran BKKBN menjadi lebih akurat dan relevan dengan tuntutan zaman. Jika BKKBN hendak bergerak dari posisi dan brand yang berpusat pada isu fertilitas ke posisi yang lebih akurat dan relevan. Pengembangan *brand* baru dapat dilakukan jika sudah jelas produk apa yang ditawarkan pada khalayak sasaran. Pada dasarnya, *rebranding* adalah untuk semua kalangan usia, namun spesifik pada kalangan milenial

yang merupakan *main constituent* dari BKKBN, generasi yang tumbuh dengan *internet* dan *smartphone* yang mengandalkan informasi dan interaksinya lewat media itu.

Tak kurang dari 5.196 orang mengikuti kompetisi dalam rangka *rebranding* yang dilakukan oleh BKKBN. Kegiatan *rebranding* yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat ini meliputi kompetisi logo, tagline, dan *jingle* BKKBN. Kompetisi ini merupakan upaya untuk melibatkan seluas mungkin masyarakat, agar BKKBN dapat lebih dekat dan relevan dengan alam pikiran serta karakter masyarakat saat ini. disamping itu, BKKBN juga secara rutin menggelar kegiatan Apresiasi Duta Generasi Berencana (GenRe) dan Jambore Ajang Kreativitas Remaja (ADU JAK GenRe) tingkat nasional, 2020 merupakan gelaran yang ke-11 yang diikuti oleh lebih dari 700 perwakilan remaja dari seluruh Indonesia, yang dilaksanakan secara on-line/virtual, mengingat pada saat itu wabah pandemic covid-19 melanda Indonesia dan dunia.

*Rebranding* yang telah dilakukan oleh BKKBN merupakan metamorfosa bentuk kerja birokrasi dari konvensional menjadi digital, terlebih pada masa pandemic covid-19 ini hampir seluruh kerja BKKBN dilakukan dengan pemanfaatan internet dalam skala masif. Reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh BKKBN menjadi semakin dekat dengan kenyataan. Reformasi birokrasi di BKKBN saat ini telah menemukan momentumnya.

### Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan penarikan simpulan diatas, penulis memberikan saran agar selanjutnya metode *rebranding* dapat dilakukan evaluasi penerapannya dan disesuaikan kembali dengan era yang berkembang kedepannya melihat adanya nilai perubahan yang dinamis dalam suatu masa. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut melihat entitas lain sebagai pendukung *rebranding* dalam sistem kerja digital.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anugrahadi Saiful. (2020). *Re-branding BKKBN, Cara Baru Untuk Generasi Baru*. Bkkbn. <http://ntb.bkkbn.go.id/?p=1773>
- Beckert, J. (2010). *Institutional Isomorphism Revisited : Convergence and Divergence in Institutional Change* Author ( s ): Jens Beckert Source : *Sociological Theory* , Vol . 28 , No . 2 ( June 2010 ) , pp . 150-166 Published by : American Sociological Association Stable URL : 28(2), 150–166.
- Dash, S. S., & Padhi, M. (2020). Relevance of Max Weber's Rational Bureaucratic Organizations in Modern Society. *Mrev Management Revue*, 31(1), 81–91.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). Public Management Research Association New Public Management Is Dead: Long Live Digital-Era Governance. Source: *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, 16(3), 467–494. <http://www.jstor.org/stable/3840393>
- Gao, X., & Tan, J. (2020). From web to weber: Understanding the case of “one-go at most” as ict-driven government reform in contemporary china\*. *China Review*, 20(3), 71–97.
- Jacomy, M., Venturini, T., Heymann, S., & Bastian, M. (2014). *ForceAtlas2, a Continuous Graph Layout Algorithm for Handy Network Visualization Designed for the Gephi Software*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098679>
- Karman. (2013). Riset Penggunaan Media dan Perkembangannya Kini - Researches on Media Uses And Its Development. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 17(1), 103–121.
- Kolleck, N., Jörgens, H., & Well, M. (2017). Levels of governance in policy innovation cycles in community education: The cases of education for sustainable development and climate change education. *Sustainability*, 9(11). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3390/su9111966>

- Llc, C., Noticias, C. E., & Nov, M. M. (2020). *The pandemic helped overcome digital bureaucracy*. 1–4.
- Meilani, N. L., & Hardjosoekarto, S. (2020). Digital weberianism bureaucracy: Alertness and disaster risk reduction (DRR) related to the Sunda Strait volcanic tsunami. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 51(September), 101898. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101898>
- Miles Matthew B and Huberman A. Michael. (1994). Qualitative Data Analysis. In *CEUR Workshop Proceedings* (Vol. 1304, pp. 89–92).
- Muellerleile, C., & Robertson, S. L. (2018). Digital Weberianism: Bureaucracy, Information, and the Technorationality of Neoliberal Capitalism. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 25(1), 187. <https://doi.org/10.2979/indjglolegstu.25.1.0187>
- Muzellec, L., & Lambkin, M. (2006). Corporate rebranding: Destroying, transferring or creating brand equity? *European Journal of Marketing*, 40(7–8), 803–824. <https://doi.org/10.1108/03090560610670007>
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT. Rineka Cipta.
- Osborne, S. P. (2010). *The (New) Public Governance: a suitable case for treatment? I*. 1–16. <https://ebookcentral.proquest.com>
- Ray, L., Reed, M., Ray, L., & Reed, M. (1994). *Organizing modernity: New weberian perspectives on work, organization and society*. ProQuest Ebook Central. <https://doi.org/https://ebookcentral.proquest.com>
- Schroeder, R. (2015). A weberian analysis of global digital divides. *International Journal of Communication*, 9(1), 2819–2837.
- Scott, J. (2011). Social network analysis: developments, advances, and prospects. *SOCNET I*. <https://remote-lib.ui.ac.id:2116/10.1007/s13278-010-0012-6>
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Refika Aditama.
- Styhre, A. (2007). The Innovative Bureaucracy. In *The Innovative Bureaucracy*. <https://doi.org/10.4324/9780203964330>
- Tassabehji, R., Hackney, R., & Popovič, A. (2016). Emergent digital era governance: Enacting the role of the “institutional entrepreneur” in transformational change. *Government Information Quarterly*, 33(2), 223–236. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.04.003>
- Yang, L and Zhang, M. (2017). The research of organization optimization and overall control mechanism in multi-projects network. *Cluster Computing*, 20(2), 1411–1423. <https://doi.org/10.1007/s10586-017-0856-x>
- Zhang, X. (2020). State Structure, Societal Organisation, and Technology Policy: A Comparison of Three Asian Countries. *Journal of Development Studies*, 56(1), 1–25. <https://doi.org/10.1080/00220388.2018.1563684>